

Menelaah Urgensi Pendidikan Multikultural di Indonesia

Arif Muzayin Shofwan

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

*Penulis Korespondensi: arifshofwan2@gmail.com

Abstract. *The implementation of multicultural education is highly urgent in a pluralistic society like Indonesia. This qualitative descriptive study, based on a literature review, examines the urgency of multicultural education in Indonesia. Content analysis was employed by categorizing data relevant to the research focus. The study concludes that the urgency of multicultural education in Indonesia lies in its roles as: an alternative means for conflict resolution; a way to ensure students remain connected to their cultural roots; a foundation for national curriculum development; and a pathway toward a multicultural society. Efforts to build a multicultural Indonesia must satisfy three conditions: the concept of multiculturalism must be widely disseminated and its urgency understood by the diverse Indonesian population; experts must reach a shared understanding of the concept for the sake of the nation and state; and this shared understanding must be accompanied by practical efforts to realize the concept's ideals. Furthermore, the discourse regarding the urgency of multicultural education in Indonesia is grounded in two factors: the country faces numerous challenges concerning the coexistence of diverse social, ethnic, and religious groups; and educational practices in Indonesia have tended to emphasize unity (ika) over diversity (bhinneka).*

Keywords: *Conflict Resolution; Cultural Diversity; Indonesian Education; Multicultural Education; Pluralistic Society.*

Abstrak. Pendidikan multikultural sangat urgen diimplementasikan dalam masyarakat majemuk seperti di Indonesia. Penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan ini membahas urgensi pendidikan multikultural di Indonesia. Teknik analisisnya menggunakan analisis isi dengan memilah-milah data yang sesuai dengan fokus penelitian. Tulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa urgensi pendidikan multikultural di Indonesia, antara lain: sebagai sarana alternatif pemecahan konflik; sebagai sarana agar peserta didik tidak tercerabut dari akar budaya; sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional; dan sebagai sarana menuju masyarakat yang multikultural. Upaya membangun Indonesia yang multikultural hanya harus memenuhi tiga hal berikut, antara lain: konsep multikulturalisme menyebar luas dan urgensinya dipahami oleh bangsa Indonesia yang multikultural; konsep multikulturalisme menjadi kesamaan pemahaman bagi para ahli demi kepentingan berbangsa dan bernegara; dan konsep multikulturalisme yang telah diperoleh kesamaan pemahaman hendaknya disertai upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk mewujudkan cita-citanya. Selain itu, wacana urgensi pendidikan multikultural di Indonesia didasarkan pada dua hal, antara lain: Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak problem tentang eksistensi sosial, etnik dan kelompok keagamaan yang beragam; dan adanya penekanan semangat ke-ika-an daripada semangat ke-bhinneka-an dalam praktik pendidikan di Indonesia.

Kata kunci: Keberagaman Budaya; Masyarakat Pluralistik; Pendidikan Indonesia; Pendidikan Multikultural; Resolusi Konflik.

1. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan bermasyarakat, kemajemukan merupakan sebuah keniscayaan Tuhan (*sunnatullah* atau *natural law*) dan merupakan realitas sosial yang harus diterima oleh semua orang dan komunitas serta tidak dapat ditolak eksistensinya. Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwa terkadang kemajemukan dan heterogenitas juga dapat menyebabkan gesekan-gesekan sosial yang bersifat destruktif dan dapat berujung pada nuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang tentu saja bisa berdampak negatif pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, kehidupan yang harmonis dan penuh toleransi harus tetap terjaga dan selalu dirawat (Ubadah, 2022). Dengan demikian, diperlukan sebuah bidang pendidikan untuk mengatasi semua itu, yang disebut pendidikan multikultural. Istilah pendidikan multikultural

menurut Ruriko Okada adalah pendidikan yang membantu para peserta didik untuk mengembangkan kemampuan mengenal, menerima, menghargai, dan merayakan keragaman kultural. Pendapat Gloria M. Ameny-Dixon yang memaparkan bahwa pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan pendidikan yang mengarah pada pengajaran dan pembelajaran yang didasarkan pada nilai-nilai demokratis yang mengafirmasi berbagai budaya plural di dalam masyarakat yang secara kultural berbeda dalam dunia yang saling ketergantungan. Francisco Hidalgo menjelaskan bahwa pendidikan multikultural adalah pembelajaran yang bebas dari rasisme, seksisme, serta bentuk-bentuk dominasi sosial dan intoleransi lainnya (Shofwan & Farantika, 2022). Pendidikan multikultural memang penting untuk peserta didik agar mereka memahami dan menerima perbedaan kebudayaan sebagai sebuah keniscayaan. Heterogenitas budaya memengaruhi tingkah laku, pola pikir, dan sikap manusia yang beragam (Nugraha, 2020). Pendidikan multikultural perlu diberikan kepada peserta didik dengan harapan agar mereka mampu memahami bahwa lingkungannya sendiri maupun lingkungan di luarnya mengandung keanekaragaman budaya. Manusia memiliki cara (*uses*), kebiasaan (*folkways*), aturan (*mores*), bahkan adat istiadat (*customs*) yang berbeda satu sama lain, karena keragaman budaya tersebut. Tujuan pendidikan multikultural adalah untuk mendidik agar peserta didik memahami relativitas budaya (*cultural relativism*). (Effendi, 2021; Zamzami & Majid, 2021). Beberapa penelitian tentang pendidikan multikultural telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Farantika, dkk. (2022) membahas tentang signifikansi nilai-nilai pendidikan Islam multikultural berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Shofwan (2023) membahas internalisasi dan fenomena pendidikan Islam multikultural di sebuah pesantren di Kota Blitar. Shofwan, dkk. (2022) membahas tentang implementasi pendidikan Islam multikultural di Indonesia. Shofwan (2021) membahas tentang penanaman nilai pendidikan Islam multikultural melalui mata pelajaran Aswaja dan Ke-NU-an. Berdasarkan penelitian tersebut, tampak belum ada penelitian yang membahas urgensi pendidikan multikultural di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini akan memulai hal tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Secara etimologis, istilah multikultural dibentuk dari dua kata, yaitu “multi” yang berarti banyak, dan “kultur” yang berarti budaya. Di sisi lain, makna “multikultural” sendiri menurut *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* berasal dari dua akar kata, yaitu “multi” berarti lebih dari satu, banyak, berlipat ganda dan “kultur” berarti kebudayaan, cara pembudidayaan, cara pemeliharaan (Riwayadi dan Anisyah, t.t.). Kata multikultural mempunyai kesinoniman dengan kata kebudayaan. Kultur berasal dari kata *cultura* dalam bahasa Latin, “*la cultura*”,

yang salah satu artinya adalah serangkaian kegiatan intelektual sebuah peradaban (Sulalah, 2011). Darmaningtyas (2004) mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik. Mahfud (2013) mengutip pendapat Ki Hajar Dewantara yang menyebutkan bahwa pendidikan pada umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual) dan tubuh anak. Sedangkan Umar (2010) mendefinisikan pendidikan sebagai proses pengembangan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan melalui pengajaran, pelatihan, proses dan cara mendidik. Berdasarkan uraian dan potongan makna di atas, pendidikan multikultural diartikan sebagai usaha sadar yang sistematis untuk menjadikan anak didik memiliki pola pikir dan tindakan multikultural. Sementara itu, Masngud (2010) mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku dan aliran atau agama. Dengan demikian, menurut Arifin (2012), implementasi pendidikan multikultural atau multibudaya dalam pembelajaran bertujuan untuk membantu siswa mengerti, menerima, dan menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, dan nilai kepribadian.

3. METODE PENELITIAN

Tulisan kualitatif ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dalam melakukan penelitiannya. Nazir (2011) menyatakan bahwa studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Sedangkan Mardalis (2006) dan Hamzah (2022) menyatakan bahwa studi kepustakaan adalah suatu studi untuk mengumpulkan informasi dan data dari beberapa hal yang ada di perpustakaan, misalnya buku, majalah, dan lain-lain. Sedangkan disebut penelitian kualitatif sebab penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi data, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna generalisasi (Abdussamad, 2021). Selanjutnya, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Atau kalau dalam studi kepustakaan dengan memilah-milah data yang sesuai dengan fokus penelitian. Sementara itu, Muhadjir (2000) menyatakan bahwa studi kepustakaan (*library research*) lebih memerlukan olahan filosofis dan teoritis daripada uji empiris di lapangan. Oleh karena bersifat filosofis dan teoritis, penelitian perpustakaan lebih sering menggunakan

pendekatan filosofis (*philosophical approach*) daripada pendekatan lainnya. Hadi (2004) menambahkan bahwa metode dalam pembahasannya, yaitu; deduksi (cara berpikir dari umum ke khusus), induksi (cara berpikir dari khusus ke umum), dan komparasi (cara berpikir untuk menemukan perbedaan dan persamaan).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang melatih dan membangun karakter peserta didik agar mampu bersikap demokratis, humanis, dan pluralis dalam lingkungan mereka (Yaqin, 2019). Sedangkan Mahfud (2013) menyatakan bahwa untuk mewujudkan multikulturalisme dalam dunia pendidikan, pendidikan multikultural juga perlu dimasukkan ke dalam kurikulum nasional, yang akhirnya dapat menciptakan tatanan masyarakat Indonesia yang multikultural. Menurutnya, urgensi pendidikan multikultural di Indonesia dapat dipaparkan sebagaimana berikut, antara lain: Pertama, sebagai sarana alternatif pemecahan konflik. Yakni, penyelenggaraan pendidikan multikultural di dunia pendidikan diyakini dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmoni yang terjadi di masyarakat Indonesia yang secara realitas plural. Menurut Mahfud (2013), terdapat dua tanggung jawab besar bagi pendidikan multikultural, yaitu: (1) menyiapkan bangsa Indonesia untuk menghadapi arus budaya luar di era globalisasi; dan (2) menyatukan bangsa sendiri yang terdiri dari berbagai macam budaya.

Munculnya konflik kerap kali ditemukan karena kurangnya pemahaman toleransi. Dalam realitas tersebut, Suyanto, sebagaimana dikutip Mahfud (2013), menyatakan bahwa masyarakat Indonesia justru mengetahui stereotip suatu suku bangsa dibandingkan dengan mengenal apa yang sebenarnya dimiliki suku tersebut. Padahal dalam konteks diskursus pendidikan multikultural, memahami makna dibalik realitas budaya suatu suku bangsa merupakan sesuatu yang esensial. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan multikultural dikatakan berhasil ketika peserta didik mampu bersikap toleran, tidak berkonflik karena perbedaan budaya, suku, bahasa, adat istiadat, dan semacamnya. Kedua, sebagai sarana agar peserta didik tidak tercerabut dari akar budaya. Yakni, dalam era globalisasi yang semakin merambah ke berbagai unsur, pertemuan antarbudaya menjadi ‘ancaman’ serius bagi peserta didik. Untuk menyikapi realitas global tersebut, peserta didik hendaknya diberikan penyadaran akan pengetahuan yang beragam, sehingga mereka memiliki kompetensi yang luas dalam pengetahuan global, termasuk aspek kebudayaan. Mahfud (2013) menyatakan bahwa mengingat beragamnya realitas kebudayaan di dalam negeri dan luar negeri, peserta didik di era globalisasi ini harus diberikan materi pemahaman tentang beragam budaya atau pendidikan

multikultural, agar mereka tidak tercerabut dari akar budaya yang ada. Tilaar, sebagaimana dikutip Mahfud (2013), menyatakan bahwa pendidikan multikultural telah menjadi suatu tuntutan yang tidak dapat ditawar-tawar dalam membangun Indonesia baru. Menurutnya, pendidikan Indonesia hingga hari ini belum mempunyai pengalaman yang memadai dalam pendidikan multikultural. Oleh karena itu, diperlukan adanya kajian dari berbagai segi terkait pendidikan multikultural, baik segi filsafat, metodologi, isi, maupun tantangan-tantangan dalam pelaksanaannya. Bahkan, ada baiknya jika pendidikan Indonesia menimba dari pengalaman-pengalaman negara lain yang telah mengaplikasikan pendidikan multikultural dalam masyarakat yang pluralistik serta dunia terbuka di era globalisasi. Mustansyir dan Munir (2001) menyatakan bahwa pengembangan ilmu di Indonesia memang tidak boleh tercerabut dari akar budaya bangsa Indonesia sendiri, terutama nilai-nilai Pancasila. Ketiga, sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional.

Yakni, dalam melakukan pengembangan kurikulum sebagai titik tolak dalam proses belajar-mengajar atau guna memberikan sejumlah materi atau isi pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik dengan ukuran dan tingkatan tertentu, menjadikan pendidikan multikultural sebagai landasan pengembangan kurikulum merupakan sesuatu yang urgen untuk dilakukan. Menurut Hasan sebagaimana dikutip Mahfud (2013) bahwa pengembangan kurikulum masa depan berdasarkan pendidikan multikultural dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut, antara lain: Mengubah filosofi kurikulum dari yang berlaku seragam menjadi filosofi yang sesuai dengan tujuan, misi, dan fungsi setiap jenjang dan unit pendidikan. Untuk tingkat pendidikan dasar, filosofi konservatif seperti esensialisme dan perenialisme haruslah dapat diubah menjadi filosofi yang lebih menekankan pendidikan sebagai upaya mengembangkan kemampuan-kemampuan peserta didik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, bangsa dan dunia. Filosofi kurikulum yang progresif seperti humanisme, progresivisme, dan rekonstruksi sosial dapat dijadikan landasan pengembangan kurikulum. Teori kurikulum tentang konten/isi (*curriculum content*) haruslah berubah dari teori yang mengartikan konten/isi sebagai aspek substantif yang berisikan fakta, teori, dan generalisasi menuju kepada pengertian yang mencakup nilai moral, prosedur, proses, dan keterampilan (*skills*) yang harus dimiliki generasi muda. Teori belajar yang digunakan dalam kurikulum masa depan yang memperhatikan keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik tidak boleh lagi hanya mendasarkan diri pada teori psikologi belajar yang menempatkan peserta didik sebagai makhluk sosial, budaya, dan politik, yang hidup sebagai anggota aktif masyarakat, bangsa, dan dunia yang harus diseragamkan oleh institusi pendidikan. Proses belajar yang dikembangkan untuk peserta didik harus berdasarkan proses yang memiliki tingkat

isomorfisme yang tinggi dengan kenyataan sosial. Artinya, proses belajar yang mengandalkan peserta didik belajar secara individualistik dan bersaing secara kompetitif-individualistik harus ditinggalkan dan diganti dengan cara belajar berkelompok, serta bersaing secara kelompok dalam suatu situasi positif. Dengan cara demikian, perbedaan antarindividu dapat dikembangkan sebagai suatu kekuatan kelompok, dan peserta didik terbiasa hidup dengan berbagai budaya, sosial, intelektual, ekonomi, dan aspirasi politik. Evaluasi yang digunakan harus meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik, sesuai dengan tujuan dan konten/isi yang dikembangkan. Alat evaluasi yang digunakan harus beragam sesuai dengan sifat, tujuan, dan informasi yang ingin dikumpulkan.

Penggunaan *alternative assessment* (portofolio, catatan observasi, dan wawancara) dapat pula digunakan. Masyarakat Indonesia memiliki keragaman sosial budaya, aspirasi politik, dan kemampuan ekonomi yang berpengaruh langsung terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan kurikulum, kemampuan lembaga pendidikan dalam menyediakan pengalaman mengajar, dan kemampuan peserta didik dalam berproses, belajar, dan mengolah informasi menjadi sesuatu yang dapat diterjemahkan sebagai hasil belajar. Oleh karena itu, keragaman tersebut menjadi suatu variabel bebas yang memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap keberhasilan kurikulum, baik sebagai proses maupun hasilnya (Hasan, 2000; Mahfud, 2013). Keempat, sebagai sarana menuju masyarakat yang multikultural. Yakni, dalam masyarakat multikultural ditegaskan bahwa corak masyarakat Indonesia yang berbhinneka tunggal ika ini bukan hanya dimaksudkan pada keanekaragaman suku bangsa, melainkan juga keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Eksistensi keberagaman kebudayaan tersebut selalu terjaga, yang bisa tampak dalam sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi antara satu kebudayaan dengan yang lainnya. Dalam konteks semacam ini, ditegaskan bahwa perbedaan bukan penghalang untuk bersatu padu untuk meraih tujuan dan mewujudkan cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945. Menurut Suparlan, sebagaimana dikutip Mahfud (2013), acuan utama terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yakni sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan. Selanjutnya, Mahfud (2013) menjelaskan bahwa upaya membangun Indonesia yang multikultural hanya mungkin dapat terwujud apabila memenuhi tiga hal berikut, antara lain: (1) konsep multikulturalisme menyebar luas dan urgensinya dipahami oleh bangsa Indonesia yang multikultural; (2) konsep multikulturalisme menjadi kesamaan pemahaman bagi para ahli demi kepentingan berbangsa dan bernegara; dan (3) konsep multikulturalisme

yang telah diperoleh kesamaan pemahaman hendaknya disertai upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk mewujudkan cita-citanya. Sementara itu, jika pendidikan multikultural dikaitkan dengan istilah “Islam”, sebenarnya tujuan pendidikan Islam secara umum adalah untuk mendidik tentang ajaran dan nilai-nilai Islam agar menjadi *way of life* (pandangan dan sikap hidup) seseorang (Daradjat, 1992). Namun demikian, menjadikan agama Islam sebagai pandangan dan sikap hidup (*way of life*) bisa mengandung makna yang positif dan negatif, sebab agama berpotensi untuk mengarah pada sikap toleran dan intoleran, berpotensi untuk mewujudkan *integrasi* (persatuan dan kesatuan) atau *disintegrasi* (perpecahan) dalam masyarakat. Fenomena intoleran tersebut menurut Muhaimin (2011) akan banyak ditentukan sedikit-tidaknya oleh: (1) pandangan teologi agama dan doktrin ajarannya; (2) sikap dan perilaku pemeluknya dalam memahami dan menghayati agama tersebut; (3) lingkungan sosiokultural yang mengelilinginya; dan (4) peranan dan pengaruh pemuka agama, termasuk guru agama dalam mengarahkan pengikutnya.

Menurut Muhaimin (2011), jika pandangan teologi agama dan ajaran yang dipegangi bersifat ekstrim, dibarengi dengan model pemahaman dan penghayatan agama yang simbolik, tekstual dan skriptual, karena penjelasan-penjelasan dan arahan dari para guru agama yang bersifat doktriner, *rigid* (kaku), dan mengembangkan sikap fanatisme buta, serta didukung oleh sosio-kultural yang eksklusif, maka bisa jadi akan bisa melahirkan sikap intoleran dan agama dapat berperan sebagai faktor *disintegratif* (pemecah), yang bisa mengancam harmoni antar kelompok masyarakat dalam Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika. Dalam konteks Indonesia, masalah integrasi keislaman dan keindonesiaan semakin konkret ketika Madjid (1983) menjelaskan hubungan Islam dan ideologi Pancasila. Ia berpendapat bahwa kaum Muslim Indonesia menerima Pancasila dan UUD 45 dengan pertimbangan yang jelas. Kedudukan Pancasila dan UUD 45, menurutnya, sama dengan kedudukan dan fungsi dokumen politik pertama dalam sejarah Islam, yaitu Piagam Madinah, dan umat pada masa Rasulullah SAW menerima konstitusi Piagam Madinah dalam rangka menyetujui kesepakatan bersama dalam membangun masyarakat politik bersama. Untuk itu, “membumikan” pendidikan agama Islam berwawasan pluralisme dan multikulturalisme merupakan sesuatu yang sangat mendesak untuk dilakukan. Kesadaran akan pentingnya pluralisme dan multikulturalisme dipandang bisa menjadi perekat baru integrasi bangsa yang sekian lama tercabik-cabik (Muhaimin, 2011). Pentingnya penguatan kesadaran multikultural ini juga didorong oleh perkembangan global (arus globalisasi) yang berdampak pada perjumpaan lintas budaya dan agama yang berlangsung amat intens, sehingga diperlukan pemahaman terhadap keragaman budaya (global) secara tepat (Hidayat, 2004; Arif, 2012). Senada dengan hal di atas, Naim dan Sauqi (2008) mengatakan

bahwa pendidikan, khususnya pendidikan Islam, dengan paradigma pluralis-multikultural menjadi kebutuhan yang mendesak untuk segera dirumuskan dan didesain dalam proses pembelajaran. Menurutnya, bagaimanapun juga, pendidikan semacam ini memiliki kontribusi dan nilai yang signifikan untuk membangun pemahaman dan kesadaran terhadap substansi dan nilai-nilai pluralitas dan multikulturalitas. Menjadikan model pendidikan Islam pluralis-multikultural sebagai bagian dari proses pembelajaran menjadi sebuah kebutuhan yang tidak terelakkan lagi. Dalam hal ini, Syahrir (2013) menyatakan bahwa keragaman budaya, agama, suku, dan bahasa di Indonesia di satu sisi merupakan kekayaan yang dibanggakan, namun di sisi lain juga kerap menimbulkan gesekan konflik vertikal dan horizontal. Kondisi ini memunculkan wacana multikulturalisme sebagai solusi.

Menurutnya, lepas dari pro-kontra yang terjadi dalam wacana ini sebagai wacana dari Barat, dia menjelaskan bahwa pluralitas sebagai basis multikulturalisme dalam perspektif Islam merupakan *sunnatullah* (*God's provision* atau ketetapan Allah) yang tidak dapat dipungkiri. Pepatah Arab menyebutnya sebagai *min lawazim al-hayah*, sebuah keniscayaan hidup (Asroni dan Ma'rifah, 2013). Dengan demikian, menurut Syahrir (2013), prinsip dasar nilai plural dan multikultural yang dikaitkan dengan Al-Qur'an tentang multikultural perlu ditanamkan pada peserta didik. Di sisi lain, kalau dikaji secara sosio-psikologis, merebaknya konflik dan tindak kekerasan di Indonesia, disadari atau tidak, berakar dari prasangka-prasangka sosial (*social prejudice*). Prasangka-prasangka tersebut berpengaruh terhadap interaksi sosial antara berbagai golongan masyarakat dan biasanya diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat pribumi, misalnya, hidup dengan sejumlah prasangka terhadap keturunan Cina dan sebaliknya. Umat Islam menyimpan sejumlah prasangka terhadap umat Kristiani dan demikian juga sebaliknya (Asroni dan Ma'rifah, 2013). Bisa jadi, dari prasangka-prasangka tersebut suatu saat akan menjadi ketegangan-ketegangan yang menakutkan (Gibb, 1991). Berbagai prasangka sosial dalam masyarakat majemuk tidak bersifat statis, tetapi dinamis. Ia dapat berubah-ubah seiring dengan berjalannya proses interaksi sosial suatu masyarakat. Ia dapat menuju interaksi sosial yang lebih baik ataupun lebih buruk. Dalam kurun waktu tertentu, golongan-golongan penduduk bisa saling mencurigai, saling membenci, tetapi juga bisa saling memahami dan saling menghormati. Hal ini ditentukan oleh cara berbagai golongan penduduk dalam suatu masyarakat yang majemuk untuk mengelola prasangka-prasangka sosial yang ada dalam diri masyarakat. Prasangka sosial pada gilirannya dapat memunculkan stereotip dan diskriminasi satu kelompok terhadap kelompok lain (Salim dan Suhadi, 2007; Asroni dan Ma'rifah, 2013). Dengan demikian, mengonstruksi pendidikan agama Islam multikultural merupakan sesuatu yang urgen guna menanggulangi stereotip dan diskriminasi tersebut serta

untuk menjadikan tingkah laku sosial masyarakat tertib dan baik. Seorang sosiolog Nottingham (1992) menyatakan bahwa apabila masyarakat diharapkan tetap stabil, dan tingkah laku sosial masyarakat bisa tertib dan baik, maka tingkah laku yang baik harus ditata dan dipolakan sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu yang relatif diterima dan disepakati bersama. Dengan demikian, melihat keadaan Indonesia yang mempunyai banyak keragaman budaya, agama, suku, etnis dan sebagainya, maka terasa urgen untuk menjadikan pendidikan multikultural sebagai pola (model) dengan prinsip-prinsipnya yang dipandang sangat sesuai dengan keadaan Indonesia yang kaya akan keragaman serta bisa menjadikan laku sosial masyarakat tertib dan baik. Menurut Aly (2012) bahwa wacana urgensi pendidikan multikultural di Indonesia pada umumnya didasarkan dua alasan, yaitu: Pertama, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak problem tentang eksistensi sosial, etnis, dan kelompok keagamaan yang beragam.

Problem tersebut disebabkan oleh pengelolaan yang kurang baik terhadap keberadaan multietnik, multibudaya, dan multiagama di Indonesia. Indikatornya terlihat pada upaya penyeragaman dalam berbagai aspek kehidupan yang dilakukan oleh pemerintah pada masa Orde Baru. Selama Orde Baru berkuasa, pemerintah mengabaikan perbedaan yang ada, baik dari segi suku, bahasa, agama, maupun budaya. Semboyan “*Bhinneka Tunggal Ika*” pun diterapkan secara berat sebelah. Kedua, adanya penekanan semangat ke-*ika*-an daripada semangat ke-*bhinneka*-an dalam praktik pendidikan di Indonesia. Beberapa indikatornya sebagai berikut: (1) terjadinya penyeragaman kurikulum dan metode pembelajaran; (2) terjadinya sentralisasi dalam pengelolaan pendidikan, yang sarat dengan instruksi, petunjuk, dan pengarahan dari atas; (3) belum adanya proses menghargai dan mengakomodasi perbedaan latar belakang peserta didik yang menyangkut budaya, etnis, bahasa, dan agama; (4) proses pendidikan dan pengajaran agama pada umumnya menekankan sisi keselamatan orang lain di luar diri dan kelompoknya sendiri; (5) terbatasnya ruang perbedaan pendapat antara guru dengan peserta didik, dan atau antara peserta didik satu dengan peserta didik lainnya; (6) fokus pendidikannya hanya pada kemampuan ritual dan keyakinan tauhid; guru lebih sering menasehati peserta didik dengan cara mengancam; (7) guru hanya mengejar standar akademik sehingga kurang memperhatikan budi pekerti dan moralitas anak; dan (8) kecerdasan intelektual peserta didik tidak diimbangi dengan kepekaan sosial dan ketajaman spiritualitas beragama. Berdasarkan uraian di atas, memang terasa ada berbagai permasalahan yang kompleks manakala merumuskan pendidikan multikultural di Indonesia. Namun demikian, tentu semua perumusan itu harus dijalankan dengan melibatkan berbagai pihak. Dengan melibatkan berbagai pihak yang multikultural pula, rumusan pendidikan multikultural di Indonesia akan terbentuk dengan lengkap dan sempurna. Oleh karena itu, ada harapan yang

sangat besar bagi pihak terkait untuk segera merumuskannya agar Indonesia yang multikultural tidak ternodai oleh hal-hal intoleransi, diskriminasi, dan semacamnya.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa urgensi pendidikan multikultural di Indonesia, antara lain: (1) sebagai sarana alternatif pemecahan konflik; (2) sebagai sarana agar peserta didik tidak tercerabut dari akar budaya; (3) sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional; dan (4) sebagai sarana menuju masyarakat yang multikultural. Upaya membangun Indonesia yang multikultural hanya perlu memenuhi tiga hal berikut, antara lain: (1) konsep multikulturalisme menyebar luas dan urgensinya dipahami oleh bangsa Indonesia yang multikultural; (2) konsep multikulturalisme menjadi kesamaan pemahaman bagi para ahli demi kepentingan berbangsa dan bernegara; dan (3) konsep multikulturalisme yang telah diperoleh kesamaan pemahaman hendaknya disertai upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk mewujudkan cita-citanya.

Selain itu, wacana urgensi pendidikan multikultural di Indonesia didasarkan pada dua hal, antara lain: (1) Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak problem tentang eksistensi sosial, etnis dan kelompok keagamaan yang beragam. Problem tersebut disebabkan oleh adanya pengelolaan yang kurang baik terhadap keberadaan multietnik, multibudaya, dan multiagama di Indonesia; (2) adanya penekanan semangat ke-*ika*-an daripada semangat ke-*bhinneka*-an dalam praktik pendidikan di Indonesia. Salah satu indikatornya adalah terjadinya penyeragaman kurikulum dan metode pembelajaran, terjadinya sentralisasi dalam pengelolaan pendidikan, yang sarat dengan instruksi, petunjuk, dan pengarahan dari atas, belum adanya proses menghargai dan mengakomodasi perbedaan latar belakang peserta didik yang menyangkut budaya, etnis, bahasa, dan agama serta lainnya.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>
- Aly, A. (2012). Model kurikulum pendidikan Islam multikultural di Pondok Pesantren Islam Assalam Surakarta. *Varia Pendidikan*, 24(1), 23–33.
<https://journals.ums.ac.id/varidika/article/view/700>
<https://doi.org/10.23917/varidika.v24i4.700>
- Arif, M. (2012). Pendidikan agama Islam inklusif-multikultural. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.14421/jpi.2012.11.1-18>

- Arifin, Z. (2012). Pendidikan multikultural-religius untuk mewujudkan karakter peserta didik yang humanis-religius. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 89–103. <https://doi.org/10.14421/jpi.2012.11.89-103>
- Asroni, A., & Ma'rifah, I. (2013). Model pendidikan multikultural dalam Islam. *Mukaddimah*, 19(1).
- Daradjat, Z. (1992). *Ilmu pendidikan Islam*. Bumi Angkasa.
- Darmaningtyas. (2004). *Pendidikan yang memiskinkan*. Galang Press.
- Effendi, H. (2021). Pendidikan Islam inklusif berbasis multikultural pada madrasah. *Journal of Education and Instruction*, 4(2), 318–324. <https://doi.org/10.31539/joeai.v4i2.2826>
- Farantika, D., dkk. (2022). The significance of the values of multicultural Islamic education in the al-Quran and al-Hadith. *Proceedings of the International Seminar on Business, Education and Science*, 1–6. <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/ip/article/view/2496> <https://doi.org/10.29407/int.v1i1.2496>
- Gibb, H. A. R. (1991). *Aliran-aliran modern dalam Islam*. Rajawali Pers.
- Hadi, S. (2004). *Metodologi research jilid 1*. Andi Offset.
- Hamzah, A. (2022). *Metode kepustakaan (library research): Kajian filosofis, teoritis, aplikasi proses dan hasil*. PT Rajagrafindo Persada.
- Hasan, S. H. (2000). Multikultural untuk penyempurnaan kurikulum nasional. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 026(6).
- Hidayat, K. (1997). Merawat keragaman budaya. Dalam T. D. Widiastono (Ed.), *Pendidikan manusia Indonesia*. Buku Kompas.
- Madjid, N. (1983). *Cita-cita politik kita: Aspirasi umat Islam Indonesia*. Leppenas.
- Mahfud, C. (2013). *Pendidikan multikultural*. Pustaka Pelajar.
- Mardalis. (2006). *Metode penelitian suatu pendekatan proposal*. Bumi Aksara.
- Masngud. (2010). *Pendidikan multikultural: Pemikiran dan upaya implementasinya*. Idea Press.
- Muhadjir, N. (2000). *Metodologi penelitian kualitatif*. Rake Sarasin.
- Muhaimin. (2011). *Urgensi pendidikan Islam multikultural untuk menciptakan toleransi dan perdamaian di Indonesia*. Aditya Media Publishing.
- Mustansyir, R., & Munir, M. (2001). *Filsafat ilmu*. Pustaka Pelajar.
- Naim, N., & Sauqi, A. (2008). *Pendidikan multikultural: Konsep dan aplikasi*. Ar-Ruzz Media.
- Nazir, M. (2011). *Metodologi penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nottingham, E. K. (1992). *Agama dan masyarakat: Suatu pengantar sosiologi agama* (A. M. Naharong, Trans.). Rajawali Pers.
- Nugraha, D., dkk. (2020). Urgensi pendidikan multikultural di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2), 140–149. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i2.40809>
- Riwayadi, S., & Anisyah, S. N. (t.t.). *Kamus lengkap bahasa Indonesia*. Sinar Terang.
- Salim, H., & Suhadi. (2007). *Membangun pluralisme dari bawah*. LKiS.

- Shofwan, A. M. (2021). Penanaman nilai pendidikan Islam multikultural melalui mata pelajaran Aswaja dan Ke-NU-an. *Madaniyah*, 11(2), 199–218. <https://journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/292>
- Shofwan, A. M. (2023). Internalization of multicultural Islamic religious education at the Bustanul Mutaallimin Dawuhan Islamic Boarding School, Blitar City. *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 3(3), 36–45. <https://doi.org/10.28926/sinda.v3i3.1107>
- Shofwan, A. M. (2023). Studi fenomena pendidikan keagamaan Islam multikultural di Pondok Pesantren Bustanul Mutaallimin Blitar. *TARQIYATUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Madrasah Ibtidaiyah*, 2(1), 71–80. <https://doi.org/10.36769/tarqiyatuna.v2i1.315>
- Shofwan, A. M., & Farantika, D. (2022). Pendidikan multikultural berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadist di pesantren. *Kreatifitas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 11(1), 47–60. <https://doi.org/10.46781/kreatifitas.v11i1.533>
- Shofwan, A. M., dkk. (2022). Implementation of multicultural Islamic education values in Indonesia. *Proceedings of the International Seminar on Business, Education and Science*, 1–6. <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/ip/article/view/2485> <https://doi.org/10.29407/int.v1i1.2485>
- Sulalah. (2011). *Pendidikan multikultural: Didaktika nilai-nilai universalitas kebangsaan*. UIN-Maliki Press.
- Syahril, Sulthan. (2013). Integrasi Islam dan multikulturalisme: Perspektif normatif dan historis. *Analisis*, XIII(2). <https://103.28.220.26>
- Ubadah. (2022). *Pendidikan multikultural: Konsep, pendekatan, dan penerapannya dalam pembelajaran*. Pesantren Anwarul Qur'an.
- Umar, B. (2010). *Ilmu pendidikan Islam*. Amzah.
- Yaqin, M. Ainul. (2019). *Pendidikan multikultural*. LKiS.
- Zamzami, M. R., & Majid, M. R. (2021). Urgensi pendidikan multikultural dalam membangun integrasi nasional. *Istifkar: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 172–182. <https://doi.org/10.62509/ji.v1i2.47>